



Problematika Pergantian Kurikulum Mengakibatkan Guru Kesulitan Menyesuaikan Konsep Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar

Ananda Tampubolon*, Heliza Ayuningsi Sitorus, Mai Saroh Nasution, Meyliana Perwita Saragih, Winda Septiana Sianturi, Waliyul Maulana Siregar

PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan pergantian kurikulum di Indonesia, khususnya kurikulum Merdeka, menghadirkan berbagai tantangan bagi para guru, salah satunya adalah kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Sekolah Dasar (SD). Kurangnya sosialisasi, pelatihan, sumber belajar, dan media pembelajaran, serta beban kerja guru yang tinggi, menjadi faktor utama yang menyebabkan guru kelas SD mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PKN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap guru kelas 5A SDS Muhammadiyah 07 Medan Area. Hasil penelitian menunjukkan Kurikulum Merdeka di Sekolah penelitian menunjukkan hasil positif pada tahun pertama, dan banyak sekolah saat ini terus mengembangkannya. Namun, masih menghadapi kesulitan dalam membuat strategi yang tepat untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka telah berjalan lebih baik dan lebih sesuai dengan konteks pendidikan saat ini. Namun, agar Kurikulum Merdeka berhasil, para pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan harus mempertimbangkan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum, Kurikulum Merdeka, Sekolah Dasar

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.545>

*Correspondence: Ananda Tampubolon

Email: anandatampubolon22@gmail.com

Received: 09-03-2024

Accepted: 17-04-2024

Published: 31-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is motivated by the problem of changing the curriculum in Indonesia, especially the Merdeka curriculum, presenting various challenges for teachers, one of which is the difficulty in adjusting the concept of learning Civics Education (PKN) in Elementary Schools (SD). The lack of socialization, training, learning resources, and learning media, as well as the high workload of teachers, are the main factors that cause elementary school classroom teachers to experience difficulties in implementing the Merdeka curriculum in Civics Education (PKN) subject. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with 5A grade teachers of SDS Muhammadiyah 07 Medan Area. The results showed that Merdeka Curriculum in the research school showed positive results in the first year, and many schools are currently continuing to develop it. However, it still faces difficulties in making appropriate strategies for implementing the Merdeka Curriculum. The results of the analysis show that the implementation of Merdeka Curriculum has gone better and is more in line with the current educational context. However, for Merdeka Curriculum to be successful, policy makers and education actors must consider it thoroughly.

Keywords: Curriculum Implementation, Elementary School, Independent Curriculum

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran penting di berbagai tingkatan pendidikan, salah satunya di tingkat sekolah dasar (SD). Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, karakter bangsa, dan budi pekerti luhur pada peserta didik. Pemberian mata pelajaran ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan, karakter, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara umum, “menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civics intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civics responsibility*), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi dari Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada penanaman konsep kenegaraan yang disertai upaya implementasi dalam kehidupan sehari-hari (Banerjee, 2023; Ghosn-Chelala, 2019; Hunter, 2020; Porto, 2019).

Sedangkan menurut Sapriya (2001), “tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat”.

Kurikulum pendidikan di Indonesia secara berkala mengalami perubahan, baik dalam hal substansi maupun metode (Halil, 2024; Purnomo, 2023; Suyadi, 2022; Wasehudin, 2023). Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintahan di Indonesia dalam mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Pada tahun 2022, telah diluncurkan kurikulum baru yang disebut sebagai Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan wujud transformasi pendidikan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada pihak sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks belajar peserta didik.

Namun, penerapan Kurikulum Merdeka ini tidak tanpa tantangan. Para guru, selaku pelaksana utama kurikulum di lapangan, menghadapi berbagai kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran PKN dengan kurikulum baru ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai mengenai kurikulum Merdeka (Halim, 2024; Jasiah, 2024; Soraya, 2023; Wardani, 2023; Yoto, 2024). Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para guru terkait konsep dan

metode pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum Merdeka. Akibatnya, mereka merasa kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran PKN sesuai dengan kurikulum Merdeka.

Selain itu, sumber belajar dan media pembelajaran yang terbatas juga menjadi hambatan signifikan. Bahan ajar dan media pembelajaran yang mendukung Kurikulum Merdeka masih terbatas, sehingga guru kesulitan mencari dan memanfaatkan sumber yang tepat. Keterbatasan ini membuat proses persiapan pembelajaran menjadi sulit dan memakan waktu, mengurangi efektivitas pengajaran di kelas. Beban kerja guru yang tinggi, baik dalam mengajar maupun dalam melaksanakan tugas administratif, semakin memperburuk situasi. Guru seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari dan memahami kurikulum merdeka serta mempersiapkan bahan ajar yang sesuai.

Tantangan lainnya adalah ketidakjelasan peran guru dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Banyak guru merasa kurang dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum ini, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapannya di ruang kelas. Ketidakjelasan ini memicu perasaan tidak yakin dan kurang percaya diri para guru dalam menyesuaikan konsep pembelajaran PKN dengan kurikulum baru. Padahal, peran guru sangat vital dalam memastikan keberhasilan implementasi kurikulum di lapangan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dapat berdampak negatif terhadap kualitas pembelajaran PKN di sekolah dasar. Jika tidak diatasi dengan segera, hal ini dapat berdampak pada pemahaman peserta didik terhadap materi yang dibawakan, khususnya yang bersinggungan dengan nilai-nilai kebangsaan, karakter bangsa, dan budi pekerti luhur. Selain itu, para peserta didik juga terancam tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berlandaskan dari hal-hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan para guru dalam menyesuaikan konsep pembelajaran PKN dengan kurikulum merdeka dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh sekolah dan pemerintah untuk membantu guru mengatasi kesulitan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat mengenai faktor-faktor penyebab guru kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran PKN dengan kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan kepada sekolah dan pemerintah tentang upaya yang dapat dilakukan untuk membantu guru dalam mengatasi kesulitan ini. Dengan demikian, diharapkan kualitas pembelajaran PKN di SD dapat ditingkatkan, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, karakter bangsa, dan budi pekerti luhur serta keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Kurikulum Merdeka.

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Penerapan kurikulum yang baik dan tepat akan sangat membantu

meningkatkan mutu pendidikan, sebaliknya apabila kurikulum yang diterapkan tidak tepat atau kurang sesuai maka akan sulit mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu “*curir*” yang artinya pelari dan “*curere*” yang artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Istilah kurikulum tersebut berkembang kemudian diterapkan dalam pendidikan.

Kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Banyak ahli kurikulum mendefinisikan pengertian kurikulum di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Hilda Taba (1962) dalam (Munir, 2008: 27) yang mendefinisikan kurikulum sebagai rencana belajar dengan mengungkapkan, bahwa *a curriculum is a plan for learning*. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Senada dengan hal itu, Nana Syaodih Sukmadinata (2010) mengatakan bahwa Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Keberadaan kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan berada pada posisi yang strategis dimana peran utamanya sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi kurikulum tidak diabaikan, karena pengalaman yang akan diberikan di dalam kelas pada pelaksanaan pendidikan akan mengacu pada kurikulum.

Kurikulum menempati posisi sentral dalam proses pendidikan. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kurikulum memegang andil sedemikian rupa terhadap proses pendidikan. Kurikulum mempengaruhi bagaimana proses pendidikan dikendalikan, diatur dan dinilai berdasarkan kriteria yang ada didalamnya. Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep kurikulum terdiri dari tiga, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi.

B. Pembelajaran PKN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:97-104). Menurut Undang-Undang, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik di semua jalur dan jenjang pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan *Civis Education* yang seyogyanya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama (Rahayu, 2007). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dan krusial dalam membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Minat belajar siswa pada bidang PKn ini perlu mendapat perhatian

khusus karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Di samping itu minat yang timbul dari kebutuhan siswa merupakan faktor penting bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya (Susanto, 2013).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Mata pembelajaran ini telah ditanamkan semenjak usia dini dan berlanjut hingga perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya tidak luntur dalam pemikiran peserta didik dan menciptakan penerus –penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Soemantri, (2001:154) ialah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan juga Pancasila.

C. Tujuan Pembelajaran PKN

Menurut Depdiknas (2006:49) tujuan pembelajaran PKN adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut : a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan; b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilatarbelakangi oleh tantangan pergantian kurikulum di Indonesia, khususnya Kurikulum Merdeka, dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Sekolah Dasar (SD). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui wawancara mendalam dengan guru kelas 5A di SDS Muhammadiyah 07 Medan Area untuk menggali informasi mengenai metode pengajaran yang digunakan dan kendala yang dihadapi. Metode analisis data yang dipilih adalah analisis tematik, dimana data yang diperoleh dari wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesulitan dan strategi penerapan kurikulum Merdeka. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memahami lebih mendalam bagaimana kurikulum baru ini diimplementasikan dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di SD.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil observasi yang telah dilakukan di SDS Muhammadiyah 07 Medan Area mengenai permasalahan dalam pembelajaran PKN, bahwa dalam pembelajaran PKN guru masih kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Sekolah Dasar akibat dari perubahan kurikulum khususnya pada Kurikulum Merdeka. Observasi yang telah dilakukan menggunakan metode wawancara terhadap wali kelas lima. Faktor-faktor yang menyebabkan guru kesulitan menyesuaikan konsep pembelajaran PKN di Sekolah Dasar dengan Kurikulum baru disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemahaman Kurikulum yang Terbatas

Guru mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait dengan kurikulum baru, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami perubahan dan cara penerapannya. Selanjutnya, bahan bacaan yang terbatas juga dapat menjadi kendala dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum baru.

2. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai

Di beberapa sekolah dasar, fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran modern mungkin belum memadai, sehingga menyulitkan guru untuk mengimplementasikan metode pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum baru. Selanjutnya, kondisi kelas yang tidak mendukung, seperti ruang yang terlalu sempit atau tidak adanya alat peraga, dapat menghambat proses pembelajaran yang efektif.

3. Beban Administratif yang Tinggi

Guru sering kali dibebani dengan tugas administratif yang tidak sedikit, sehingga mengurangi waktu dan energi mereka dalam mempersiapkan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum baru. Selanjutnya, kurangnya waktu pengembangan diri seperti beban kerja yang tinggi membuat guru sulit meluangkan waktu mengikuti pelatihan atau membaca materi terkait kurikulum baru.

4. Penyesuaian Materi Ajar

Kurikulum baru memperkenalkan konsep atau materi yang lebih kompleks yang sulit untuk disampaikan kepada siswa SD. Selanjutnya, guru perlu perlu mengadaptasi bahan ajar lama dengan kurikulum baru, yang memerlukan waktu dan usaha tambahan.

5. Kurangnya Dukungan dan Kerjasama

Kurangnya dukungan dari pihak manajemen sekolah atau kolega bisa membuat guru merasa kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat menjadi hambatan, terutama dalam implementasi strategi pembelajaran baru yang membutuhkan partisipasi aktif dari siswa di rumah.

6. Keterampilan dan Pengalaman Guru

Guru yang kurang berpengalaman menghadapi kesulitan lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum baru dibandingkan dengan guru yang lebih

berpengalaman. Selanjutnya, keterampilan pedagogis antara guru dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif.

Tentunya hal tersebut didasari oleh beberapa alasan mengapa guru kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran seiring dengan kurikulum yang silih berganti. Pertama, Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap kurikulum Merdeka. Kedua, Keterbatasan sumber belajar dan media pembelajaran PKN. Ketiga, Beban kerja guru yang tinggi. Keempat, Ketidakjelasan peran Guru dalam Kurikulum Merdeka.

(1) Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan terhadap Kurikulum

Pencapaian reformasi pendidikan yang efektif menuntut keterlibatan guru sebagai pusat pengembangan kurikulum. Hal tersebut menjadikan guru sebagai salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan kurikulum, yang termasuk didalamnya langkah-langkah implikasi dan evaluasi. Disamping itu, keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum terdapat pada peran guru dalam penyelarasan isi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik.

Permasalahan dalam pencapaian reformasi pendidikan yang efektif ini terletak pada kurang meratanya pelatihan Kurikulum Merdeka kepada semua guru. Terutama sosialisasi dan Bimtek yang secara khusus membahas mengenai pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh guru di sekolah dasar yang dipilih sebagai responden, mereka menyatakan bahwa belum semua guru di sekolah dasar memperoleh kesempatan untuk mengikuti sosialisasi tentang Kurikulum Merdeka (Sunarni & Hari Karyono, 2023).

Untuk itu guru dapat berkolaborasi dengan dinas Pendidikan. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mengidentifikasi guru yang belum mengikuti pelatihan dan menyusun jadwal pelatihan tambahan yang bisa disesuaikan dengan waktu dan kondisi mereka. Selain itu juga dapat mengadakan pelatihan secara berjenjang, mulai dari pelatihan dasar hingga lanjutan. Guru yang sudah mengikuti pelatihan dasar bisa kemudian menjadi fasilitator atau mentor bagi rekan-rekan mereka yang belum mengikuti pelatihan.

(2) Keterbatasan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PKN

Keterbatasan sumber daya dan media pembelajaran PKN dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan Proyek Kolaboratif Siswa, dorong siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif yang dapat menjadi sumber belajar, salah satunya adalah praktik belajar kewarganegaraan (*Project Citizen*).

Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*) adalah suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Dengan adanya praktik, siswa diberikan latihan untuk belajar secara kontekstual (Depdiknas, 2003: 12). Sedangkan menurut Budimansyah (2009: 1) *Project Citizen* adalah satu *instructional treatment* yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan,

dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civic society*).

Menurut Budimansyah dan Karim Suryadi (2008: 25) strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi "*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning,*" yang dikemas dalam model "*project*" ala John Dewey. Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah, yaitu: a. Mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat; b. Memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas; c. Mengumpulkan informasi terkait pada masalah-masalah itu; d. Mengembangkan portofolio kelas; e. Menyajikan portofolio; f. Melakukan refleksi pengalaman belajar.

(3) Beban Kerja Guru yang Tinggi

Guru memiliki beban kerja yang tinggi tanpa disertai keseimbangan dengan penghasilan yang memadai. Hal ini mengartikan bahwa telah terjadi *imbalance* antara beban kerja dan kesejahteraan para guru. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit guru pengampu mata pelajaran yang tidak selinear dengan latar belakang pendidikannya. Adapun untuk menangani hal ini, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja guru. Hal ini dimaksudkan agar mutu pendidikan tetap terjamin meskipun guru pengampu tidak berasal dari latar belakang yang linear. Peningkatan hasil kinerja kerja guru merupakan hal yang paling mendasar yang menentukan kualitas pendidikan di masa depan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi dan rendahnya mutu/kualitas pendidikan di sekolah. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kesiapan guru dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik sekaligus pengajar yang memberikan seperangkat pengalaman belajar siswa di sekolah. Peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme guru yang juga perlu diimbangi dengan tingkat kesejahteraannya. (Dadang Wahyudi, 2020).

(4) Ketidakjelasan Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Nurani, dkk., 2022). Kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik (Hikmah 2022). Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, serta menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan kemampuan berpikir siswa (Farhana 2022). Dengan demikian kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran di mana konten akan lebih optimal serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik (Dwi Sunarti., dkk, 2024).

Upaya membantu guru mengatasi kesulitan dalam menyesuaikan konsep pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Sekolah Dasar dengan kurikulum baru, sekolah dan pemerintah dapat melakukan upaya yaitu:

- a. Pelatihan Berkelanjutan. Pemerintah dan sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru, yang berfokus pada pemahaman kurikulum baru dan metode pengajaran yang efektif seperti mengadakan workshop yang memberikan simulasi praktis tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum baru dalam kelas;
- b. Penyediaan Sumber Daya dan Materi Pembelajaran. Menyediakan buku panduan, modul, dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum baru, memberikan akses ke teknologi, seperti komputer dan proyektor, serta alat peraga yang diperlukan untuk mengajar;
- c. Peningkatan Infrastruktur Sekolah. Meningkatkan fasilitas kelas agar lebih mendukung pembelajaran interaktif dan menyenangkan seperti laboratorium dan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih variatif;
- d. Bimbingan dan Pendampingan. Menyediakan pendampingan dari mentor atau fasilitator pendidikan yang berpengalaman dalam kurikulum baru, menerapkan program coaching bagi guru untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan pedagogis dan memahami penerapan kurikulum baru secara lebih mendalam;
- e. Pengurangan Beban Administratif. Mengurangi beban administratif guru dengan delegasi tugas administratif ke staf administrasi, sehingga guru dapat lebih fokus pada persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, mengimplementasikan sistem administrasi digital yang lebih efisien untuk mengurangi waktu yang dihabiskan guru dalam mengurus tugas administratif.

Guru berperan dalam mengasah minat dan bakat peserta didik. Guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yang dapat mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam mengeksplorasi pengetahuan. Guru juga berperan sebagai inovator pembelajaran, guru harus mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi siswa.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian kurikulum di Indonesia, khususnya Kurikulum Merdeka, menghadirkan berbagai problematika yang signifikan bagi guru sekolah dasar (SD) dalam mengajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Problematika utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya sosialisasi dan pelatihan, keterbatasan sumber belajar dan media pembelajaran, serta beban kerja yang tinggi, yang mengakibatkan kesulitan dalam penyesuaian konsep pembelajaran PKN sesuai dengan kurikulum baru. Meskipun demikian, penerapan kurikulum Merdeka menunjukkan hasil positif dalam tahun pertamanya, dengan sekolah-sekolah yang terus berusaha mengembangkan dan menyesuaikan strategi untuk implementasi yang lebih efektif. Agar penerapan kurikulum

Merdeka dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan yang komprehensif dari para pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi guru.

Saran untuk guru, yaitu guru hendaknya lebih mempersiapkan media belajar yang konkret dan tepat untuk menerapkan pendekatan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Guru sebaiknya memiliki kompetensi yang mumpuni dalam berkomunikasi sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dan orang tua, memberikan umpan balik, dan menjawab pertanyaan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Guru juga harus bisa menyesuaikan pembelajaran PKN dengan perkembangan kurikulum dan tuntutan kurikulum. Guru juga harus siap dalam menghadapi pergantian-pergantian kurikulum yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Banerjee, S. (2023). Collaborative online international learning, social innovation and global health: cosmopolitical COVID lessons as global citizenship education. *Globalisation, Societies and Education*. <https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2209585>
- Budiman, D. (2008). Revitalisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan (Project Citizen). *Acta Civicus*, 1(2).
- Dwi Sunarti, Zaelah Tri Mutiara, Lenia Mardianti, & Sucita Ayu. (2024). Pentingnya guru penggerak dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 116-123.
- Farhana, I. (2020). Merdekakan pikiran dengan kurikulum merdeka. Cibubur: Penerbit Linden Bestari.
- Fujiawati, F. S. (2016). Pemahaman konsep kurikulum dan pembelajaran dengan peta konsep bagi mahasiswa pendidikan seni. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, 1(1), April.
- Ghosn-Chelala, M. (2019). Exploring sustainable learning and practice of digital citizenship: Education and place-based challenges. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 40–56. <https://doi.org/10.1177/1746197918759155>
- Halil, N. I. (2024). Preservation of Tolaki Mekongga Language Through Merdeka Curriculum-Based Local Subject Teaching Modules. *Journal of Language Teaching and Research*, 15(3), 960–971. <https://doi.org/10.17507/jltr.1503.30>
- Halim, A. (2024). A study on how the Merdeka curriculum promotes multilingualism in Indonesian ELT classrooms. *XLinguae*, 17(2), 107–121. <https://doi.org/10.18355/XL.2024.17.02.07>
- Haryati, T. (2012). Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui belajar kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Ilmiah*.
- Hikmah, N. (2022). Kurikulum merdeka pendidikan Islam anak usia dini. Tangerang Selatan: Bait Qurany Multimedia.

- Hunter, W. J. (2020). Blended and online learning for global citizenship: New technologies and opportunities for intercultural education. *Blended and Online Learning for Global Citizenship: New Technologies and Opportunities for Intercultural Education*, 1–200. <https://doi.org/10.4324/9780367821661>
- Jasiah. (2024). Islamic Teachers' Implementation of the Merdeka Curriculum in Senior High Schools: A Systematic Review. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(4), 394–408. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.4.21>
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(3), 418-430.
- Malora, S. (2013). Artikel wawancara. Retrieved from https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/s_malora/artikel-wawancara_552a26256ea8343b1d552d28
- Munir. (2008). *Kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Nurani, D., et al. (2022). Serba-serbi kurikulum merdeka kekhasan sekolah dasar: Timpusat Kurikulum dan Pembelajaran.
- Porto, M. (2019). Does education for intercultural citizenship lead to language learning? *Language, Culture and Curriculum*, 32(1), 16–33. <https://doi.org/10.1080/07908318.2017.1421642>
- Purnomo, A. R. (2023). Embedding Sustainable Development Goals to Support Curriculum Merdeka Using Projects in Biotechnology. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(1), 406–433. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.1.23>
- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan: Perjuangan menghidupi jati diri bangsa*. Depok: PT Grasindo.
- Soraya, D. U. (2023). An Alternative Learning Management System to Improve the Learning Accessibility of Merdeka Curriculum. *ICEEIE 2023 - International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering*. <https://doi.org/10.1109/ICEEIE59078.2023.10334753>
- Sunarni. (2023). Persepsi guru terhadap implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar. *Journal On Education*, 1613-1620.
- Suyadi. (2022). COVID-19 ambassadors: Recognizing Kampus Mengajar at the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program humanitarian projects in the tertiary education curriculum. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.902343>
- Wahyudin, D. (2020). Pengaruh tingkat kesejahteraan guru dan beban kerja guru terhadap kinerja guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 135-148.
- Wardani, H. K. (2023). Eanalysis Of The Impact Of The Merdeka Curriculum Policy On Stakeholders At Primary School. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 513–530. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.801>

-
- Wasehudin. (2023). Transforming Islamic Education Through Merdeka Curriculum In Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 255–266. <https://doi.org/10.15575/jpi.v9i2.28918>
- Yoto. (2024). The role of industry to unlock the potential of the Merdeka curriculum for vocational school. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2335820>